

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan juga cerminan dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Maka sejalan dengan Visi Kepala Daerah yaitu **Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera Dan Dinamis "Yang Mantap" Berlandaskan Iman Dan Taqwa** dan selaras dengan Misi ke empat yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik maka Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

“ Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi, data dan persandian berbasis TIK”.

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya maka indikator dari Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas yang berbasiskan TIK. Tujuan ini secara langsung mendukung Misi ke empat Kepala Daerah pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Adapun sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.a.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan	Persentase pelayanan publik yang	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik

	yang baik melalui peningkatan layanan informasi,	optimal dan berkualitas yang berbasis TIK		
2	data dan persandian berbasis TIK		Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3			Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah.	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi statistik daerah
4			Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Persentase penyelenggaraan Persandian
5			Meningkatnya akuntailitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka di dapatkan sejumlah rumusan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dengan Strategi :

- a. Menyediakan layanan publik berbasis TIK, yang terintegrasi, aman terpadu, menyeluruh, handal dan mudah diakses masyarakat, arah kebijakan :
 - ✓ Peningkatan system dan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik yang transparan, terintegrasi, aman, terpadu, menyeluruh, andal dan mudah di akses masyarakat.

- ✓ Implementasi keterbukaan informasi Publik PPID serta mekanisme penanganan pengaduan dan fasilitasi penanganan sengketa informasi.
2. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government) dengan Strategi :
- a. Meningkatkan pengembangan TIK, arah kebijakan :
 - ✓ Pembinaan dan pengembangan TIK
 - ✓ Pengadaan sarana dan prasarana TIK
 - ✓ Pembangunan, penataan aplikasi dan layanan informasi
 - ✓ Pemenuhan indikator penilaian SPBE
 - b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Inovatif berbasis TIK, arah kebijakan :
 - ✓ Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Inovatif berbasis TIK
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana di daerah Blankspot, arah kebijakan :
 - ✓ Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan ketersediaan layanan koneksi jaringan
 - d. Mengajukan rancangan produk hukum ketatalaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota, arah kebijakan :
 - ✓ Perda ketatalaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah dengan Strategi :
- a. Melaksanakan pengembangan data dan informasi, arah kebijakan :
 - ✓ Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
 - ✓ Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
 - ✓ Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian, dengan Strategi :
- a. Peningkatan Pengelolaan dan penyelenggaraan persandian, arah kebijakan :
 - ✓ Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.
 - ✓ Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah.

5. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan, dan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Strategi :
- a. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan material, arah kebijakan :
 - ✓ Peningkatan pengawasan intern dokumen pertanggung jawaban
 - ✓ Peningkatan Sumberdaya personil, pengawas intern dan dokumen peraturan pertanggung jawaban.
 - b. Peningkatan nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, arah kebijakan :
 - ✓ Evaluasi atas perencanaan kinerja meliputi evaluasi atas perencanaan Strategis dan perencanaan Kinerja Tahunan.
 - ✓ Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi evaluasi atas pemenuhan pengukuran dan kualitas pengukuran kinerja tahunan
 - ✓ Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi atas pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja tahunan
 - ✓ Evaluasi atas evaluasi internal meliputi evaluasi atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi kinerja tahunan
 - c. Peningkatan indek Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, arah kebijakan:
 - ✓ Peningkatan pemenuhan kriteria/ indikator penilaian Reformasi birokrasi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.b.1.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tanggal 02 Januari 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik	86,3
2.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9
3.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi statistik daerah	80 %
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Persentase penyelenggaraan Persandian	30 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	>70 - 80 (72)

Dengan rincian anggaran sebelum perubahan/ Anggaran Awal untuk setiap program sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.595.704.400	DAU
2	Program Pengkajian Data Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	251.745.800	DAU
3	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	49.746.000	DAU
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	803.046.400	DAU
5	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	162.071.400	DAU
6	Program Penyelenggaraan persandian	476.363.000	DAU
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.044.488.200	DAU
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396.788.656	DAU
9	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.750.400	DAU
	Total	6.790.704.256	

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Utama pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, dengan melaksanakan 9 Program dan 44 kegiatan pada awal tahun 2020 dengan Pagu dana awal sebesar Rp. 6.790.704.256,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dan sesuai surat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Nomor 900/987/BK-LK/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Refocussing dan Realokasi Program Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Penanganan dan Pencegahan Covid-19 maka pada tanggal 30 April 2020 terjadi Refocussing Anggaran Program dan Kegiatan guna Penanganan dan Pencegahan Wabah Virus Covid-19 menjadi 8 Program dan 39 Kegiatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 4.916.093.029,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan pada tanggal 3 November 2020 Pagu Dana DPA Hasil Refocussing dijadikan Pagu dana DPA Perubahan sebesar Rp. 4.916.093.029,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam

Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) tanpa adanya pengembalian sisa dana penanganan wabah covid-19 ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dilakukan penyesuaian menjadi :

Tabel 2.b.2.

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Pada tanggal 03 November 2020**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik	76
2.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9
3.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi statistik daerah	80 %
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Persentase penyelenggaraan Persandian	12,5 %
5.	Meningkatnya akuntailitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	>70 - 80 (72)

Dengan rincian anggaran DPA Perubahan untuk setiap program sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.138.704.400	DAU
2	Program Pengkajian Data Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	240.595.800	DAU
3	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	429.036.479	DAU
4	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	82.877.600	DAU
5	Program Penyelenggaraan persandian	93.326.200	DAU
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	674.906.150	DAU

No	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	247.420.000	DAU
8	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.226.400	DAU
	Total	4.916.093.029	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja



Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.a

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja



dengan jelas.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik	Indek	76
2.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indek	2,9
3.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi statistik daerah	%	80
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Persentase penyelenggaraan Persandian	%	12,5
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Indek	> 70-80

Tabel 3.b.

Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek Keterbukaan Informasi Publik	76	76	100 %	Sangat Tinggi
2.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9	3,17	109 %	Sangat Tinggi
3.	Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah	Persentase Pemanfaatan data dan Informasi statistik daerah	80	83	104%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Persentase penyelenggaraan Persandian	12,5	12,50%	100%	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS 1 :

MENINGKATKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Indek Keterbukaan Informasi Publik		76	76	100%



Tingkat capaian Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang diumumkan pada bulan November 2020 mencapai indek 76 (Cukup Informatif) dan telah mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 ini. Untuk mencapai realisasi ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.

keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
3. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten.
4. Sikap Kejujuran, Komitmen dan demokratis.
5. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja yakni :

1. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian,
2. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.

3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu tidak rutin di isi/ upload dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka.
4. Penyesuain aktifitas dalam menghadapi Wabah Virus Covid-19.
5. Kurang Koordinasi/ pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
6. Ruang untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih terlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan meminta informasi.

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan Progam Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. Jumlah dana sebesar Rp. 2.643.404.400,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.643.170.400,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99,99% serta efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar Rp. 234.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Jumlah dana sebesar Rp. 63.140.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 47.855.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 75,79 % serta efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar Rp. 15.285.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2020 dan Target Renstra tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.c.1.1

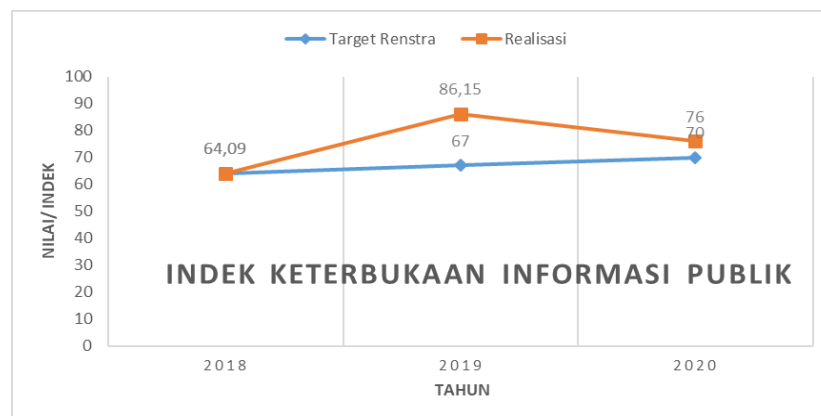
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Renstra Tahun 2016 – 2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi			Capaian Kinerja
					2018	2019	2020	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi data dan persandian berbasis TIK	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	70	64,09	86,15	76,00	109%

Pada tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2020 dan target renstra tahun 2016-2021 telah melebihi target renstra sebesar 70, akan tetapi mengalami penurunan besaran realisasi hal ini disebabkan antara lain terjadinya Refocussing Anggaran Program dan Kegiatan, PSBB dan Protokol kesehatan Covid-19 yang harus dipatuhi. Hal ini jelas akan mempengaruhi capaian kinerja kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga hanya mencapai Realisasi 76.

Grafik 3.c.1.2

Indek Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2018 – 2020 dengan Target Renstra



Berikut disampaikan perbandingan Capaian Kinerja tahun 2018, 2019 dengan Tahun 2020 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.c.1.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dengan Tahun 2020

berdasarkan Hasil Realisasi Kinerja

Misi	Tujun	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %			Percepatan/ (perlambatan)
				2018	2019	2020	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi data dan persandian berbasis TIK	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	100	100	100%	0 %

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 3.c.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra 2016 – 2021

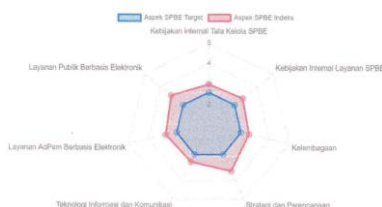
Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	100%	76	76	100%	75	101,33%

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai indikator Kinerja Meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik tahun 2020 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan, seperti yang telah ditetapkan dalam table diatas.

Indek keterbukaan Informasi Publik ini dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 bulan November 2020 dengan nilai indek 76 (Cukup Informatif). Untuk mencapai keberhasilan ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.

SASARAN STRATEGIS 2 :
MENGEMBANGKAN DAN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (e-Government)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota		2,9	3,17	109 %



Tingkat capaian Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah (e-Government) yang untuk tahun 2020 yang telah keluaran oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 20 Januari 2021 Nilai Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 3,17 dengan Prediket Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Baik. Untuk penilaian tingkat Kementerian yakni berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke <http://spbe.go.id>. Untuk mencapai keberhasilan ini, harus memenuhi 7 (tujuh) aspek atau 35 Indikator penilaian dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan sebagai berikut :

1. Aspek 1 Kebijakan Tata Kelola SPBE
 - Indikator 1 Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah.
 - Indikator 2 Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi.
 - Indikator 3 Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah.